

TESIS

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Magister Hukum*



Disusun oleh :

MARLINA VEPRI
1820112012

Dosen Pembimbing :

- 1. DR. REMBRANDT, S.H., M.PD**
- 2. DR. HENGKI ANDORA, S.H., LL.M**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG2022**

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Marlina Vepri, NIM : 1820112012, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum Universitas Andalas, 2022, 141 Halaman

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam demokrasi. Dimana dalam proses pembangunan daerah diperlukan partisipasi masyarakat dimulai pada tahap perencanaan yakni RKPD. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD disalurkan melalui DPRD yakni dalam bentuk pikir melalui reses sedangkan yang melalui pemerintah dengan musrenbang. Berkaitan dengan hal tersebut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat permasalahan yakni : 1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD berdasarkan peraturan perundang-undangan? 2. Bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat? 3. Bagaimana upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka *mewujudkan good governance* dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif-empiris. Sumber data yang didapat penulis dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian dimana pengaturan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat belum disertai dengan aturan dan mekanisme yang jelas dan tidak adanya penerapan sanksi. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD melalui DPRD lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur sedangkan yang melalui pemerintah dalam hal ini musrenbang hanya sekedar formalitas saja. Partisipasi masyarakat yang ideal, dimana adanya pemeriksaan kembali sebelum usulan diputuskan sehingga sesuai dengan kehendak masyarakat. Saran dari penulis, diperlukan adanya instrumen hukum yang menjamin kekuatan hukum dari partisipasi masyarakat itu sendiri dalam perencanaan pembangunan daerah. Pemberdayaan masyarakat lebih penting dari hanya sekedar pembangunan fisik. Dimana perlu adanya transparansi dari pemerintah agar partisipasi dapat berjalan optimal serta dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang ideal disesuaikan dengan adat dari daerah yang bersangkutan yakni seperti musyawarah untuk mufakat.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



**COMMUNITY PARTICIPATION IN DEVELOPMENT OF LOCAL
GOVERNMENT WORK PLAN IN TANJUNG JABUNG BARAT
DISTRICT**

Marlina Vepri, NIM : 1820112012, Master of Law
Program, Andalas University Faculty of Law, 2022,
141 Pages

ABSTRACT

Community participation is key in democracy. Where in the regional development process, community participation is needed starting at the planning stage, namely the RKPD. Community participation in the preparation of the RKPD is channeled through the DPRD, namely in the form of thinking through the recess, while through the government through the musrenbang. In connection with this, in Tanjung Jabung Barat Regency there are problems, namely: 1. What is the form of community participation in the preparation of the RKPD based on statutory regulations? 2. How is the implementation of community participation in the preparation of the RKPD in Tanjung Jabung Barat Regency? 3. What are the efforts to increase community participation in the context of realizing good governance in the preparation of the RKPD in Tanjung Jabung Barat Regency? In this study, the author uses a normative-empirical juridical method. Sources of data obtained by the author from library research and field research. The results of the study where the regulations related to community participation have not been accompanied by clear rules and mechanisms and there is no application of sanctions. The implementation of community participation in the preparation of the RKPD through the DPRD prioritizes infrastructure development, while through the government, in this case, the Musrenbang is only a formality. Ideal community participation, where there is a re-examination before the proposal is decided so that it is in accordance with the wishes of the community. Suggestions from the author, it is necessary to have a legal instrument that guarantees the legal force of the participation of the community itself in regional development planning. Community empowerment is more important than just physical development. Where there is a need for transparency from the government so that participation can run optimally and in realizing ideal community participation adapted to the customs of the area concerned, such as deliberation for consensus.

Keywords: *Community Participation, Local Government Work Plan (RKPD).*